

BAB II

PEMBAHASAN

A. Masa Pemerintahan Sebelum Mahathir Mohammad

Negara Semenanjung Malaysia (sekarang) yang semula diberi nama Persekutuan Tanah Melayu dimerdekakan 31 Agustus 1957. Dalam usia kemerdekaannya 42 tahun, negara bekas jajahan kolonial Inggris ini selama 450 tahun di jajah bangsa asing. Pada awalnya penjajahan Melaka oleh Portugis pada 11 Agustus 1511, dan Belanda pada tahun 1641. Terakhir penjajahan negeri Tanah Melayu oleh Inggris. Negara Persekutuan Tanah Melayu ini berbatasan sebelah Barat dengan Thailand, sebelah Timur dan Tenggara berbatasan dengan Kalimantan dan Sumatera (Indonesia).

Pada mulanya negara bekas jajahan kolonial Inggris ini meliputi Malaysia dan Singapura. Akan tetapi kemudian 1965, Singapura memisahkan diri menjadi negara merdeka yang lepas dari Persekutuan Tanah Melayu.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, negara Semenanjung Malaysia menghadapi persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup lebar (1957-1970). Pada masa itu, masyarakat Malaysia terkotak-kotak dalam tiga aspek. Aspek pertama, bersifat geografis : bumiputera tinggal di pedesaan, sedangkan masyarakat non-bumiputera (keturunan Cina dan India) tinggal di perkotaan. Aspek kedua, karena tinggal di desa-desa, maka pertanian menjadi basis ekonomi bumiputera. Memang ada juga yang tinggal di perkotaan, yaitu mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri. Sedangkan non-bumiputera menguasai bidang-bidang ekonomi. Mereka bergerak di bidang bisnis.

Banyak di antara mereka yang kemudian dikenal sebagai konglomerat. Aspek ketiga, adalah pendapatan. Sebagai petani dan pegawai pemerintah, penghasilan bumiputera rendah, jadi miskin. Sebaliknya, non-bumiputera menguasai sumber-sumber daya ekonomi sehingga kaya-kaya.

Sungguhpun Malaysia menghadapi permasalahan etnik sangat rentan, negeri jiran ini dianggap relatif berhasil dan dinamis dalam menjalankan sistem kehidupan demokrasi dan politik kenegaraan. Pasca masa pemerintahan Tunku Abdul Rahman (Tun Abdul Razak hingga pada masa pemerintahan Tun Sri Datuk Mahathir Mohammad) masalah kerusuhan rasial tidak pernah muncul lagi. Jika ada, hanya sebatas perbedaan sikap politik yang tampil dalam bentuk oposisi terhadap Barisan Nasional (kumpulan partai-partai yang bergabung dalam UMNO) yang berkuasa.

B. Kebijakan Politik Luar Negeri Era Mahathir

Kebijakan politik luar negeri Malaysia memang dirasakan banyak mengalami perubahan besar pada masa Mahathir. Perubahan itu bisa dikaitkan dengan latar belakang pendidikan Mahathir yang berasal dari bidang kedokteran yang jauh berbeda dengan pendidikan para pendahulunya. Ketiga perdana menteri sebelum Mahathir memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yakni ilmu hukum.

Pada masa Mahathir, hubungan dengan negara-negara ASEAN, Asia Timur merupakan prioritas utama yang tetap dipertahankan oleh Mahathir. Kemudian kedua, diikuti dengan negara-negara anggota Gerakan Nonblok dan berikutnya memperkuat hubungan dengan negara-negara Islam dan negara Persemakmuran.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa kebijakan politik luar negeri Malaysia semasa Mahathir mengalami perubahan besar. Perubahan ini bisa disimak dengan diterapkannya *New Economic Policy* (NEP) yang dimulai pada tahun 1971-1990. Kebijakan ini untuk memperbaiki dan membenahi struktur perekonomian etnik Melayu yang semenjak kolonial Inggris terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pada masa pemerintahan Mahathir, kebijakan politik luar negeri yang paling menonjol adalah Kebijakan Memandang ke Timur (*Look East Policy*). Salah satu alasan Mahathir melakukan kebijakan ini adalah bahwa Inggris tidak cocok lagi untuk dijadikan contoh bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan politik Malaysia. Bergesernya orientasi ini dengan memilih Jepang dan NICs Asia (Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong) merupakan jawaban yang tepat dan strategis.

Look East Policy yang diumumkan Mahathir pada bulan Desember 1981, bertujuan mendukung pelaksanaan *New Economic Policy* (NEP). Look East Policy semula merupakan suatu upaya peningkatan etos kerja, seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju di bagian Timur semisal Jepang. Negara ini, keahlian dan disiplin dalam bidang pekerjaan, kesetiaan terhadap negara, merupakan sikap mental yang positif bagi peningkatan produktivitas serta efisiensi pekerjaan. Adanya pemberian pelatihan dan peningkatan skill bagi para pekerja, pengembangan wawasan dan motivasi kerja, dengan meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil gap antara majikan dan pekerja.

Tujuan lain *Look East Policy* adalah mengundang investasi Jepang dan NICs Asia menanamkan modalnya di Malaysia. Dengan melibatkan Jepang dan NICs Asia ini dapat

menjadi model pembangunan ekonomi negara. Sehingga dengan demikian, Malaysia dapat berkembang maju menjadi salah satu “Calon Macan Asia” di kawasan Asia Tenggara.

Hubungan ekonomi Jepang-Malaysia sudah dimulai sejak tahun 1957 dengan pendirian pabrik tekstil di Malaysia. Jepang merupakan salah satu partner dagang Malaysia yang memiliki total perdagangan sebesar seperlima seluruh total perdagangan Malaysia. Kerjasama kedua negara yang dinilai berhasil adalah berdirinya *Heavy Corporation of Malaysia Berhad* HICOM, yaitu suatu lembaga yang menjadi pelopor dari embrio usaha-usaha negara di bidang manufacturing, termasuk perusahaan pembuat mobil dan dua perusahaan besar yaitu semen dan baja.

Pada tahun 1982, HICOM menciptakan sebuah perusahaan otomotif. Mitsubishi merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi sebuah mobil. Dengan ketentuan bahwa pemilikan mayoritas sebesar 70 persen berada pada HICOM dan 30 persen dimiliki oleh Mitsubishi Motor dan Mitsubishi Corporation, masing-masing 15 persen. Perusahaan Mitsubishi ini menanamkan modal sebesar \$ 2.000 juta pada sebuah perusahaan pembuat mobil yang diberi nama PROTON SAGA. SAGA berasal dari bahasa Melayu yang berarti kekuatan dan kestabilan. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 2.000 tenaga kerja etnik Melayu.

Pada tahun 1970-1973, sudah terdapat 197 perusahaan Jepang di Malaysia. Menjelang tahun 1977 jumlah ini membengkak menjadi 489 perusahaan yang didirikan

dengan investasi US \$ 425 juta. Sehingga dapat dikatakan hampir 70 persen pabrik yang berdiri di Malaysia “berbau” Jepang.

Kemudian investasi Jepang di Malaysia pada tahun 1981, mencapai 69 juta Ringgit dan meningkat menjadi 766.6 Ringgit pada tahun 1983, yang merupakan nomor dua setelah Singapura. Menyusul dibelakangnya adalah Inggris dengan nilai investasi sebesar 973 juta Ringgit. Kenaikan investasi Jepang di Malaysia sejak tahun 1987 disebut sebagai gelombang ketiga setelah gelombang pertama dari tahun 1973 dan gelombang kedua dari tahun 1982. Pada gelombang ketiga ini memiliki kekhasan yang berbeda bila dibandingkan dengan dua gelombang sebelumnya. Pada gelombang yang pertama, investasi di Malaysia dikonsentrasikan pada industri padat karya seperti berat seperti besi, baja, dan pada gelombang kedua dibidang kendaraan bermotor. Pada gelombang yang ketiga, relokasi industri dititikberatkan pada industri spesifik yang disetujui, dari proposal yang diajukan oleh investor asing adalah 44.4 persen pada tahun 1987 dan 39.2 persen tahun 1988, 33.0 persen tahun 1990. Jumlah peningkatan keseluruhan dari 54 dalam tahun 1987 menjadi 127 tahun 1989 dan dari Januari hingga September 1990 berjumlah 94.

Dalam bidang perdagangan, Jepang dikenal sebagai partner dagang nomor satu Malaysia dengan total perdagangan Malaysia (23 persen dari semua impor dan 20 persen dari nilai ekspor). Jepang membeli 1/3 minyak Malaysia, 30 persen timah, 2/3 kayu gelondongan dan kayu potong serta produk gas alam. Sedangkan produk Jepang seperti teknologi manufaktur, kapital mencapai 80 persen dari impor Malaysia (Singapura nomor dua berjumlah 17 persen). Keuntungan lain dari kerjasama ini telah memberikan prediket



bagi Malaysia yaitu termasuk dalam tiga besar untuk produksi semi konduktor. Sebagian produk semi konduktor itu di ekspor, lebih dari 15 tahun perusahaan-perusahaan semi konduktor Jepang seperti HITACHI, TOSHIBA, sudah menanamkan investasinya di Malaysia untuk pertumbuhan industri Syah Alam yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Semenanjung Malaysia. Look East Policy disamping mempromosikan investasi dan perdagangan dengan Jepang dan Korea Selatan sekaligus melakukan program pertukaran pelajar. Pelajar Malaysia dari kalangan bumiputera dikirimkan ke Jepang dan Korea Selatan untuk belajar dalam bidang teknik dan etos kerja.

Melalui industrialisasi sektor modern terutama manufactur, Malaysia berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah investor yang ikut menanamkan modal di Malaysia baik melalui perusahaan yang sifatnya patungan maupun swasta penuh. Terlihat misalnya tingginya tingkat investasi di Malaysia jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti yang terlihat pada tabel ini :

Tabel 1: Asia Pasifik Foreign Direct
Investment Inward Flows, 1980-1990
(\$ Million)

Host Region/economy	1980-1985 (Annual Average)	1986	1988	1990
ASEAN	1, 584	1, 137	3, 336	6, 772
Indonesia	227	258	576	964
Malaysia	1, 058	489	719	2, 902
Philippines	35	127	936	530
Thailand	264	263	1, 105	2, 376

Source: United Word Investment Refort (New York: United Nations Departement of Economic and Social Development, 1992).

Investasi Jepang di Malaysia tahun 1986-1990 mendukung ranking paling atas yakni berkisar 25-35 persen. Disusul dengan Taiwan tahun 1987, kemudian Singapura. Sedangkan Amerika, investasinya tidak lebih dari 5 persen. Tabel berikut ini memperlihatkan penanaman modal asing terbesar di Malaysia dari tahun 1986-1990.

Tabel 2 : Investasi Asing Terbesar di Malaysia

1986-1990

Negara	1986	1987	1988	1989	1990
Jepang	264,4 (27,6)	116,3 (6,9)	715,1 (34,7)	1.222,0 (25,1)	2.682,2 (31,3)
Taiwan	31,4 (3,3)	10,8 (0,6)	243,0 (11,8)	829,6 (17,0)	2.119,4 (24,7)
Singapura	100,2 (10,5)	183,7 (10,9)	258,5 (12,5)	419,6 (8,6)	910,9 (10,6)
Amerika Serikat	111,9 (11,7)	53,6 (3,2)	162,7 (7,9)	535,2 (11,0)	320,8 (3,7)
Inggris	26,9 (2,8)	44,5 (2,9)	76,8 (3,7)	196,5 (4,0)	764,1 (8,9)
Hongkong	28,2 (2,9)	55,9 (3,3)	88,9 (4,3)	298,4 (6,1)	352,1 (4,1)
Korea Selatan	25,0 (2,6)	4,0 (0,2)	3,6 (0,2)	41,8 (0,9)	189,0 (2,2)

Melihat pergeseran ekonomi politik global, kini telah muncul fenomena regionalisasi ekonomi baru. Gagasan East Asia Economic Caucus (EAEC) yang diprakarsai oleh Mahathir pada bulan desember 1990 yang lalu sebenarnya berasal dari Pusat Studi Strategik dan Kajian International Malaysia (ISIS). Forum regional ini merupakan forum kerjasama ekonomi yang bersifat longgar, konsultatif, tidak mengikat dengan beranggotakan negara-negara ASEAN, Asia Tenggara, negara-negara Indocina, Myanmar, dan negara Asia Timur lainnya. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh sikap

Malaysia dalam mengantisipasi beberapa agenda perubahan yang terjadi di Eropa dengan terbentuknya Pasar Tunggal Eropa yang dimulai 11 Januari 1993.

Menurut Mahathir, EAEC akan memberikan jaminan bagi negara-negara Asia Timur pada saat sistem perdagangan global menjadi suram, di mana uni Eropa dan NAFTA mengurung diri dengan berbagai hambatan terhadap negara-negara dunia. Barangkali ketidakjelasan perkembangan ekonomi global ini menjadi suatu kekuatan penggerak yang melatarbelakangi berbagai bentuk kerjasama regional yang sekarang ini - --termasuk EAEC---, menumbuhkan suatu fenomena regionalisme baru di kawasan Asia timur dan Asia Tenggara.

Mahathir dalam sebuah wawancaranya dengan Asahi Shimbun di Tokyo, menegaskan kembali pendirian Malaysia dengan prinsip utama: *pertama*, kepentingan ekonomi dalam negeri Malaysia adalah faktor yang paling menentukan dalam transaksi hubungan ekonomi internasionalnya. Untuk itu, Malaysia akan melakukan perundingan dan kesepakatan dengan negara lain secara bilateral. *Kedua*, Malaysia menantang supremasi suatu negara manapun di dunia dalam menentukan kebijaksanaan hubungan ekonomi negara lain. Dengan perkataan lain, Malaysia menentang habis-habisan jika ada suatu negara yang ingin mendikte bagaimana Malaysia harus melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam hal ini, secara spesifik, Malaysia tidak menginginkan adanya *hegemoni* Barat dalam konstelasi ekonomi dan politik dunia. Mahathir menginginkan agar dalam konstelasi ekonomi dan politik dunia, ada kekuatan tandingan dari Asia untuk mengimbangi Barat dan sekutu-sekutunya di Pasifik (Australia dan Selandia Baru).

Ketiga, Malaysia menentang keras setiap upaya yang ingin membentuk suatu kawasan perdagangan bebas (termasuk perdagangan jasa-jasa) di Asia Pasifik, di mana Amerika Serikat, Selandia Baru turut menjadi anggota. Menurut Malaysia, berdasarkan perhitungan para ahli ekonominya, jika kawasan Asia menjadi kawasan perdagangan bebas di mana Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru turut menjadi anggota, akan terjadi *welfare gain* bagi ketiga negara ini. Sementara itu, negara-negara Asia Pasifik yang lemah (seperti Indonesia) akan mengalami *welfare loss*. Akhirnya, tujuan untuk memperkecil kesenjangan pendapatan sedang berkembang akan menjadi buyar, sehingga akan terbentuk kesenjangan baru. Bersamaan dengan itu pula, tujuan untuk meminimumkan hegemonik dalam percaturan ekonomi dan politik dunia juga akan sirna.

Bagi Mahathir, melakukan perubahan kebijakan politik luar negeri semasa pemerintahannya yang sebelumnya berorientasi Barat sekarang keTimur (Jepang), tidak lepas dari keinginan Malaysia membuktikan diri sebagai kandidat negara industri baru yang memiliki kemandirian ekonomi dan teknologi, sekaligus berpengaruh secara politik dalam menyongsong abad ke-21, ---yang diramalkan banyak pengamat sebagai kebangkitan abad Asia---. Dengan cara mendekatkan diri kepada Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong merupakan sebuah pilihan politik yang tepat, strategis dan rasional, yang semestinya mendapat dukungan dari masyarakat Semenanjung Malaysia.*